

**IMPLEMENTASI KLINIK KONSULTASI PELAYANAN
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)
DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA MADIUN**



Oleh :

EMI SETYANINGSIH

NIM : 24222241

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2026

**IMPLEMENTASI KLINIK KONSULTASI PELAYANAN
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)
DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA MADIUN**

Tugas Akhir

Diajukan Guna Melengkapi Syarat untuk mencapai Gelar Sarjana
Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Oleh :

EMI SETYANINGSIH

NIM : 24222241

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

HAKI ini disusun oleh : EMI SETYANINGSIH
NIM : 24222241
Judul : IMPLEMENTASI KLINIK KONSULTASI
PELAYANAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)
DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KOTA MADIUN
Disahkan Pada : 23 Januari 2026

Ponorogo, 23 Januari 2026

Pembimbing I



Dra. Ekapti Wahjuni DJ, M.Si
NIDN: 0722126101

Pembimbing II



Dr. Insyira Yusdiawan Azhar, M.Sos
NIDN: 0720129401

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : IMPLEMENTASI KLINIK KONSULTASI PELAYANAN
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) DI DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN

Disusun Oleh : EMI SETYANINGSIH

NIM : 24222241

Telah dipertahankan di
depan penguji pada :

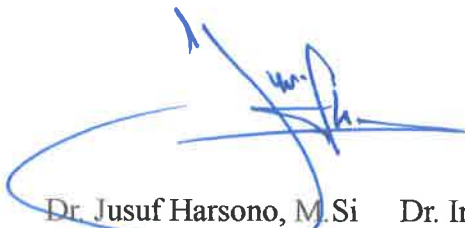
Hari : KAMIS, 29 JANUARI 2026

Ruang : B102

Pukul : 10.00 – 11.00

Dewan Penguji,

Penguji I


Dr. Jusuf Harsono, M.Si
NIDN: 0713016201

Penguji II


Dr. Insyira Yusdiawan Azhar, M.Sos
NIDN: 0720129401

Penguji III


Dra. Ekapti Wahjuni Dj, M.Si
NIDN. 0722126101

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Darwis Nasution, M.A
NIK. 19860228 202109 12

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa Syukur aku persembahkan tugas akhir HKI ini kepada suami dan anak-anakku tersayang juga kepada orang tua dan kakak-kakakku yang telah memberikan do'a, semangat dan dukungan penuh selama menempuh Pendidikan dan menyelesaikan tugas akhir HaKI ini.

Terima Kasih atas semua doá yang tercurah dan semangat yang selalu diberikan.



EMI SETYANINGSIH

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah berharaplah”
(QS. Al Insyirah : 6-8)



ABSTRAK

SLF (Sertifikat Laik Fungsi) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun sesuai dengan PBG (Persetujuan bangunan gedung) dan telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan berdasarkan hasil pemeriksaan dari instansi terkait. Tanpa adanya SLF, bangunan gedung tidak bisa beroperasi secara legal. Menurut Permen PU no. 27/PRT/M/2018 tentang “Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung” bahwa masa berlaku SLF bangunan gedung lainnya pada umumnya, dan bangunan gedung tertentu ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan penelitian utama klinik konsultasi adalah memberikan pendampingan teknis bagi masyarakat dalam pengurusan SLF. Pelaksanaan klinik konsultasi telah didukung oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten, namun keterbatasan jumlah pegawai teknis menyebabkan antrian pelayanan meningkat pada waktu tertentu dan masih terdapat kendala dalam hal konsistensi pelayanan di luar jam kerja. Komunikasi antar instansi telah berjalan cukup baik melalui sistem perizinan terpadu, namun masih ditemukan kendala dalam sinkronisasi data antara Dinas PUPR dan DPMPTSP. Namun demikian dengan beberapa kendala tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun berusaha memaksimalkan pelayanan agar dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pemenuhan perizinan sertifikat laik fungsi (SLF). Kendala lain yang mungkin sering kali menghambat proses perizinan sertifikat laik fungsi adalah Dinas selaku pemberi izin tidak menyediakan Tim ahli yang dapat membantu untuk melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan oleh pemohon, sehingga di dalam prosesnya pemohon harus mencari Tim ahli yang bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen perizinan sertifikat laik fungsi (SLF). Pelaksanaan klinik konsultasi SLF telah berjalan cukup efektif sebagai inovasi pelayanan publik di bidang perizinan bangunan gedung. Klinik ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk mendapatkan pendampingan teknis serta konsultasi langsung mengenai persyaratan dan proses penerbitan Sertifikat Laik Fungsi.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pelayanan Publik, Klinik Konsultasi, Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

ABSTRACT

The Certificate of Feasible (Sertifikat Laik Fungsi/SLF) is an official document issued by the local government for buildings that have been completed in accordance with the Building Approval (Persetujuan Bangunan Gedung/PBG) and have fulfilled both administrative and technical feasibility requirements based on their designated function. Without an SLF, a building is not legally permitted to operate. Based on the Regulation of the Minister of Public Work No. 27/PRT/M/2018 concerning the Guidelines for Certificates of Feasible Function, the validity period of the SLF for general and certain specific buildings is five (5) years. This study aims to analyze the implementation of the SLF consultation clinic as a form of public service innovation at the Department of Public Works and Spatial Planning (PUPR) of Madiun City. The consultation clinic is intended to provide technical assistance and guidance to the community in the SLF application process. The implementation has been supported by competent human resources, however, limitations in the number of technical personnel have resulted in increased service queues at certain times and inconsistencies in service delivery outside regular working hours. Although inter-agency coordination through an integrated licensing system has been established challenges remain in data synchronization between the PUPR department and the One-Stop Integrated Investment and Licensing Service Office (DPMPTSP). Despite these constraints, the Department of Public Work and Spatial Planning of Madiun City continues to optimize its service to facilitate the fulfillment of SLF licensing requirements. Overall the SLF consultation clinic has been implemented effectively and contributes positively to improving service accessibility and providing direct technical consultation for the community and business actors regarding SLF requirements and procedures.

Keyword: implementation, public service, consultation clinic, Certificate of Feasible Function (SLF), Department of Public Works and Spatial Planning.